

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Hasil analisis varians menunjukan selama empat tahun dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi yaitu tingkat penyerapan anggaran dari tahun ke tahun tidak seimbang. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 dengan tingkat penyerapannya sebesar 94.45 % , tahun 2016 mengalami penurunan dengan tingkat penyerapannya sebesar 90.03 %, tahun 2017 dengan tingkat penyerapannya mengalami peningkatan sebesar 92.55 % sedangkan pada tahun 2018 dengan tingkat penyerapannya juga mengalami peningkatan sebesar 92.77%. sehingga dari sisi analisis varians Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah baik dalam menggunakan anggaran belanja walaupun dalam tahun 2015 dan tahun 2016 ada pos – pos belanja yang realisasinya melebihi anggaran yang diaanggarkan.
2. Hasil analisis pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun anggaran 2015/2016, tahun anggaran 2016/2017 dan tahun anggaran 2017/2018 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami keadaan fluktuasi dengan pertumbuhan yang

menunjukkan hasil positif. Dimana pada tahun 2015/2016 pertumbuhan belanja sebesar 11.25 %, pada tahun 2016/2017 mengalami peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 25.17 % sedangkan pada tahun 2017/2018 mengalami penurunan pertumbuhan dengan selisih yang sangat jauh sebesar 4.57 %, sehingga dari sisi analisis ini kinerja belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan cukup baik karena telah mengupayakan pemamfaatan belanja daerah selalu mengalami pertumbuhan yang fluktuasi.

3. Hasil analisis belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun anggaran 2015-2018 dalam menggunakan aktivitas belanjanya hanya difokuskan pada belanja tidak langsung. Dimana pada belanja tidak langsung sebesar 63.92 % sedangkan pada belanja langsung sebesar 36.08 %. Hal ini merupakan indikasi yang kurang baik, kerena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih menggunakan belanja untuk kepentingan yang tidak terkait secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, sedangkan belanja langsung ialah hal yang paling penting untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pembangunan daerah.
4. Hasil analisis belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap total Belanja Daerah dari tahun 2015-

2018 Pemerintah Daerah Provinsi NTT belum efektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga masyarakat masih kurang merasakan dampak dari alokasi anggaran untuk pembangunan daerah Provinsi NTT.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi badan keuangan daerah agar semakin meningkatkan Proporsi dalam pengalokasian untuk Belanja Daerah, dengan demikian pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan kinerja yang baik maka pertumbuhan dalam wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di rasakan oleh masyarakat.
2. Agar asas adil dan manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih meningkatkan pengalokasian untuk belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar pertumbuhan dan pembangunan dapat di rasakan oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti tentang anggaran Belanja Daerah secara lebih rinci sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2001,*Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Edisi Pertama*,BPFE,Yogyakarta.S
- Bastian, Indra.2006,*Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Beritasatu com, Kementrian PUPR 2020 *fokuis Pembangunan Sumber Daya Air, Infrastruktur, Konektivitas Jalan dan Jembatan, serta Pemukiman Perumahan* : Jakarta
(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)
- Halim, Abdul.2007,*Akuntansi Keuangan Daerah*,Selemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti.2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua,UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul & Kasufi, Muhamad Syam.2014 *Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat, Jakarta
- Kompas.com *Mentri Keuangan Sri Mulyani Menyentil Para Kepala Dearah Yang Tak Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Dinamika Anggran Yang Di Berikan Pemerintah Pusat* : Jakarta
<https://amp.kompas.com/money/red/2019/11/14/184301326>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *pedoman pengelolaan keuangan daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang *pedoman penyusunan APBD*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang *pedoman penyusunan APBD*
- Pelatin, (2019). “*Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014-2016*”:Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Anggaran Pendapatan
Belanja Negara 2017*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang *Anggaran Pendapatan
Belanja Negara 2018*

Utama, (2018). “*Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap
Pendapan Asli Daerah di kabupaten Tasikmalaya*” Universitas Islam
Indonesia.